

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM	5.01.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni UU No 25 tahun 2004 dan Permendagri no 54 tahun 2010, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan <i>top down</i>, <i>bottom up</i>, teknokratik, politis, aspiratif. - Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan <i>bottom up</i> dan aspiratif - Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2019 dan 2020 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain : disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin, perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V. - Pelaksanaan musrenbang tahun 2019 dan 2020 peserta yang hadir 155 orang. - Komposisi jenis kelamin 74% laki-laki dan 26% perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 40%, swasta 2%, masyarakat 58% (ormas, LSM) - Komposisi peserta dari kelompok umur anak-anak (0-18 tahun) 3% pemuda (18 – 30 th) 15% dewasa (30 – 60 th) 75% lansia (60 th ke atas) 7% - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2015 dan 2016 <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undanguan tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan musrenbang minim - <i>E-planning</i> diharapkan akan mengakomodir semua komponen masyarakat <p>Partisipasi</p> <p>Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang di undang.</p> <p>Kontrol</p> <p>Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>Manfaat</p> <p>Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak di perbolehkan <p>c. Penyebab EKsternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan musrenbang lebih mengutamakan seremonial daripada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan

CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terwujudnya perencanaan yang responsif gender		
	2. Indikator dan Target Kinerja a. Terlaksananya penganggaran yang responsive gender b. Terlaksananya kordinasi perencanaan pembangunan antara stakeholder yang ada		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 122.690.000,-
		Keluaran	Penganggaran yang Responsif Gender
		Hasil	Terlaksananya kordinasi perencanaan pembangunan antara stakeholder yang ada

Padang Panjang, 5 Maret 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



RUSDIAWTO, S.IP, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : **BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**
TAHUN ANGGARAN : **2022**

PROGRAM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
KODE PROGRAM	5.01.03		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengamankan setiap pemerinta daerah membentuk Pokja PUG yang salah satu tugasnya menyusun perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender. - Kondisi saat ini di Kota Padang Panjang Pelaksanaan PPRG belum berjalan maksimal ditandai dengan Pokja PUG baru sebatas SK - Pemahaman Kepala OPD terkait dengan PUG belum Optimal - PUG masih dianggap sebagai tugas tambahan - Fokal Point dimasing OPD belum berjalan optimal ditandai dengan belum semua OPD mempromosikan PUG di masing masing OPD dan PUG belum dianggap sebagai kebutuhan - Belum semua OPD menindaklanjuti terkait Rekomendasi Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Padang Panjang untuk mencantumkan Dasar Hukum, data terpilah dan isue gender di dalam Renstra OPD 		
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses Terbatasnya informasi terkait dengan PUG dan PPRG</p> <p>Partisipasi Komitmen Kepala OPD masih kurang ditandai dengan minimnya kehadiran pada pelaksanaan Sosialisasi atau dalam menindaklanjuti dalam penyusunan GAP dan GBS</p> <p>Kontrol</p> <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih dianggap sebagai beban tambahan. - Manfaat penerapan GAP dan GBS tidak langsung terasa - Tidak ada Punishmen dan Reward <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas <p>c. Penyebab EKsternal PUG dianggap tidak menarik dan dianggap hanya mengurus masalah perempuan saja</p>		
CAPAIAN PROGRAM	<p>3. Tolak Ukur Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>		
	<p>4. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>c. Terlaksananya penganggaran yang responsive gender</p> <p>d. Terwujudnya pengarusutamaan gender Kota Padang Panjang</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 52.353.100,-		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan 1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Masukan	Rp. 52.353.000,-
		Keluaran	Penganggaran yang Responsif Gender
		Hasil	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender di Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 5 Maret 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



RUSDianto, S.IP, MM

Pembina Utama Muda N.P. 19640402 198602 1 003